

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI PERIODE 2012-2016

Jeni ninsi sari
Muh. Yunus kasim
Cici rianty k. Bidin

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako

Email: jenipodung28@gmail.com, cicirianty@gmail.com, yunuskasim@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to measure performance using indicators achievement between targets and realization of programs based on RAPBD. With measurement of financial performance, it is expected that will provide overview the condition of Regional Financial Performance in DPPKAD SIGI. This research uses quantitative descriptive method, which is aim get detailed picture about regional financial of SIGI. The results of study, (1) Fiscal Decentralization Degree Ratio can be categorized as Very Less, from 2012 to 2016 the value of average expenditure below 10% 2.00%; 2.07%; 3.10%; 2.37%; and 2.70%. (2) ratio of Regional Financial Independence is very low and the pattern of relationships including Instructive relationship patterns, from 2012 to 2016 the value of each ratio is: 2.05%; 2.12%; 3.22%; 2.80%; and 2.70%. (3) Regional Financial Efficiency Ratios from 2012 to 2016 the percentage value fluctuates. (4) PAD Effectiveness Ratio is known that effectiveness of local government finances from 2012 has been effective that is equal to 101.20%. While 2013 until 2016 Not Effective because its effectiveness still below 100%. (5) Harmony Ratios of Local Governments most of funds with average expenditure above 70% so that capital expenditure is relatively small with average below 60%.

Keywords: *Fiscal Decentralization Degree Ratio, Ratio of Regional Financial Independence, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial, Efficiency Ratio, Harmony Ratio.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator pencapaian antara target dan realisasi dari program yang telah disusun berdasarkan RAPBD. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut, diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kondisi Kinerja Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten SIGI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu yang tujuannya adalah mendapatkan suatu gambaran secara jelas dan terperinci, mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten SIGI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, dari tahun 2012 sampai dengan 2016 nilai rasionya masing-masing sebesar: 2,00%; 2,07%; 3,10%; 2,37%; dan 2,70%. (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, dari tahun 2012 sampai dengan 2016 nilai rasionya masing-masing sebesar: 2,05%; 2,12%; 3,22%; 2,80%; dan 2,70%. (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dari tahun 2012 sampai 2016 nilai persentasenya berfluktuasi. (4) Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan pemerintah daerah dari tahun 2012 sudah Efektif yaitu sebesar 101,20%. Sedangkan tahun 2013 sampai tahun 2016 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%. (5) Rasio Keserasian Pemerintah daerah sebagian besar dananya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dengan rata-rata belanja diatas 70% sehingga belanja modal relatif kecil dengan rata-rata belanja dibawah 60%.

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja.

1. PENDAHULUAN

Menurut Mahmudi (2007), Otonomi Daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” yang merupakan penyempurnaan atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” (UU No. 25 Tahun 1999). Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten SIGI merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta

memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SIGI adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam bidang keuangan untuk periode waktu tertentu. Apabila dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut, diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kondisi Kinerja Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten SIGI.

Dapat dilihat tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten SIGI jika diukur dengan rata-rata pertumbuhan PAD dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan nilai persentase sebesar 13% ditahun 2012, ini dikarenakan potensi Sumber daya alam di kabupaten SIGI saat itu naik, selanjutnya diposisi kedua sebesar 19% ditahun 2013, ini dikarenakan hasil pertanian dan Retribusi daerah tahun tersebut naik, peningkatan lebih terjadi diposisi ketiga sebesar 71% ditahun 2014, hal ini dikarenakan Potensi SDA, SDM, retribusi daerah, pajak daerah dan pendapatan lain-lain sangat meningkat, kemudian diposisi keempat tingkat pertumbuhan yang sangat menurun sebesar 8% ditahun 2015, hal ini disebabkan oleh melemahnya kemampuan penerimaan daerah Kabupaten SIGI dalam mengelolah sumber pendapatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan belanja. dan diposisi kelima tingkat pertumbuhan 2016 meningkat sebesar 28% Hal ini dikarenakan sedikit demi sedikit pemda Kabupaten SIGI bisa mengoptimalkan hasil SDA, SDM dan pajak daerah Sehingga PAD bisa lagi ditingkatkan dari sebelumnya.

2. KAJIAN LITERATURE DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PAD ialah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan daerah, penerimaan dinas dan lain-lain. Rendahnya angka PAD dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Adisasmita (2010), APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis Kirja Keuangan ialah melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah membiayai daerah tersebut tanpa campur tangan pemerintah pusat dengan pengukuran kinerja keuangan serta alat analisis yaitu Rasio Keuangan. Mahmudi (2009).

Derajat Desentralisasi Fiskal dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Mahmudi (2010), mengatakan bahwa Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Desentralisasi. PAD merupakan aspek yang dianggap menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Mahmudi (2010), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman atau transfer dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mahmudi (2011), Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat

dari rasio efisiensi. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim, 2007).

Kuncoro (2014), menuliskan tentang tujuan pengukuran efektivitas Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Mahmudi (2010), yang mengatakan bahwa Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Menurut Halim (2012), semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. dan Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, Yang tujuannya adalah mendapatkan suatu gambaran secara jelas dan terperinci, mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten SIGI. Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten SIGI dilihat dari pendapatan daerah terhadap APBD. Alasan penulis mengambil objek ini adalah untuk mengetahui perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SIGI dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggungjawab dan mengetahui apakah pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Mengukur perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rumus yang digunakan ialah:

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Tahun T}}{\text{Total Pendapatan Daerah Tahun T}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rumus yang digunakan ialah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Rumus yang digunakan ialah:

$$REKD = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas PAD

Membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Rumus yang

digunakan ialah:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Menunjukkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Rumus yang digunakan ialah :

$$\text{RBO} = \frac{\text{Total Belanja Oprasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{RBM} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Target dan Realisasi PAD Kabupaten SIGI Tahun 2012–2016

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	%
2012	11.444.098.005	11.582.482.885	101,21
2013	14.801.879.767	13.798.177.820	93,22
2014	24.894.901.154	23.589.608.190	94,76
2015	26.881.600.327	25.506.504.287	94,88
2016	36.754.878.027	32.701.048.951	88,97

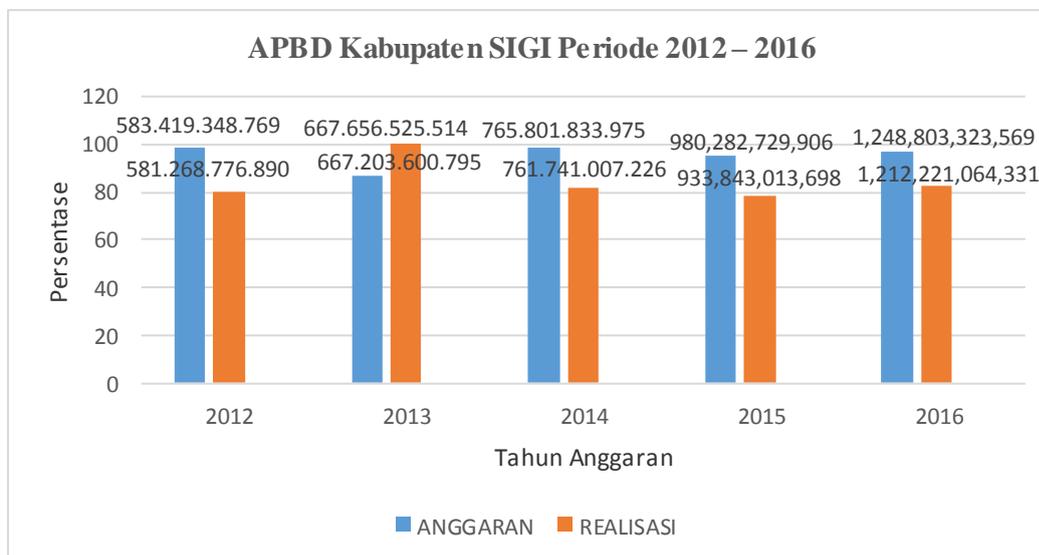
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI (data diolah,2017).

Penentuan target PAD oleh Pemda Kabupaten SIGI ialah salah satunya dari potensi Sumber daya alam (SDA). Dikatakan SDA karena PAD itu bersumber dari pengelolaan dari sumber-sumber alam yang ada contohnya Galian C, hasil hutan (bukan kayu), rotan, damar dll yang hasil alamnya bisa dikelola. Kemudian Potensi Sumber daya manusia (SDM), SDM didapatkan dari kegiatan manusia yang menghasilkan uang contohnya kegiatan Pariwisata, Expo, Kerajinan tangan, dll yang menyangkut kreativitas masyarakat SIGI dalam mendapatkan PAD, Retribusi daerah Contohnya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu serta Pajak daerah.

Berdasarkan tabel 2 bahwa realisasi PAD yang hendak dicapai dalam penerimaan PAD di Kabupaten SIGI cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai 2016 mengapa demikian karena dilihat dari potensi-potensi yang ada, semakin tinggi potensi yang diperoleh maka semakin naik PAD di daerah tersebut. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas menunjukkan pada tahun 2012 PAD yang ditargetkan di Kabupaten SIGI sebesar Rp.11.444.098.005 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.11.582.482.885 dan capai target. Jika dibandingkan dari target anggaran dengan anggaran yang terealisasi, persentase yang didapatkan sebesar 101,21% atau sekitar Rp.138.384.880. Dilihat lagi pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp.13.798.177.820 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.13.798.177.820 namun tidak capai target. Jika dibandingkan dari target anggaran dengan anggaran yang terealisasi, persentase yang didapatkan sebesar 93,22% atau sekitar Rp.1.003.701.947. Kemudian tahun 2014 meningkat sebesar Rp.23.589.608.190 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.23.589.608.190 namun tidak capai target. Jika dibandingkan dari target anggaran dengan anggaran yang terealisasi, persentase yang didapatkan sebesar 94,76% atau sekitar Rp.1.305.301.964. Tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.25.506.504.287 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.25.506.504.287 namun tidak capai target. Jika dibandingkan dari target anggaran dengan anggaran yang terealisasi, persentase yang didapatkan sebesar 94,88% atau sekitar Rp.1.375.096.040. Dan terus menerus naik sampai pada tahun 2016, PAD tertinggi di Kabupaten SIGI sebesar Rp.32.701.048.951 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.32.701.048.951 namun tidak capai target. Jika dibandingkan dari

target anggaran dengan anggaran yang terealisasi, persentase yang didapatkan sebesar 88,97% atau sekitar Rp.4.053.829.076.

Gambar I
Anggara pendapatan dan Belanja Daerah



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI (data diolah, 2017).

APBD kabupaten SIGI terjadi fluktuasi ditiap tahunnya dikarenakan pada tahun 2012, 2015 dan 2016 terjadi defisit, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut potensi dan kinerja keuangan Kabupaten SIGI dalam kegiatan pembelanjaan dan mengelolah pendapatan melemah. Pada praktiknya APBD yang defisit tidak selalu defisit dalam pertanggungjawabannya. Artinya, LRA bisa saja surplus, yakni pendapatan yang terealisasi lebih besar daripada belanja yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi dalam perencanaan keuangan berbeda dengan yang terealisasi dalam pelaksanaan anggaran. Namun, perbedaan antara anggaran dan realisasi ini (dari defisit menjadi surplus) akan bermakna dan berkaitan dengan anggaran daerah tahun berikutnya. Pemda yang mengalami defisit dalam anggaran dapat saja menyisakan dana pada akhir tahun dalam bentuk SiLPA realisasian karena pelampauan target pendapatan dan tidak tercapainya target realisasi belanja. Pelampauan target pendapatan bisa disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang targetnya dibawah potensi riil, informasi tentang penerimaan daerah dari pemerintah diperoleh setelah penetapan Perda APBD-P, dan diterimanya lain-lain pendapatan yang sah setelah APBD-p ditetapkan, sedangkan tidak tercapainya target belanja bisa disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan (output kegiatan tercapai, tetapi anggarannya tidak terealisasi seluruhnya), kegiatan belum selesai (sehingga anggaran yang belum digunakan “di bawa” ketahun anggaran berikutnya), dan kegiatan yang batal dilaksanakan.

Tabel 3
Penghitungan RDDF DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	RDDF (%)	Kemampuan Keuangan
2012	11,582,482,885.86	581,268,776,890.86	2,00	Sangat Kurang
2013	13,798,177,820.61	667,656,525,514.61	2,07	Sangat Kurang
2014	23,589,608,190.34	761,741,007,226.34	3,10	Sangat Kurang
2015	25,506,504,287.59	933,843,013,698.59	2,73	Sangat Kurang
2016	32,701,048,951.41	1,212,221,064,331.41	2,70	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Desentralisasi.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2012 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada DPPKAD Kabupaten SIGI sebesar 2,00%. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan menjadi 2,07%, dan 3,10%. Tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 2,73% pada tahun 2015. Terjadi lagi penurunan menjadi 2,70% pada tahun 2016. Meskipun sempat mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,10%, namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan DPPKAD SIGI masih Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

Tabel 4
Penghitungan RKKD DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer + Provinsi + Pinjaman	RKKD (%)	Pola Hubungan
2012	11,582,482,885.86	564,064,104,005.00	2,05	Instruktif
2013	13,798,177,820.61	650,177,380,694.00	2,12	Instruktif
2014	23,589,608,190.34	731,440,554,036.00	3,22	Instruktif
2015	25,506,504,287.59	907,904,562,921.00	2,80	Instruktif
2016	32,701,048,951.41	1,177,095,508,050.00	2,78	Instruktif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat dari Rasio Kemandirian kemampuan keuangan DPPKAD Kabupaten SIGI dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2012 nilainya sebesar 2,05%, tahun 2013 mengalami kenaikan 0,07% dengan nilai sebesar 2,12%, pada tahun 2014 terjadi peningkatan 1,1% dengan nilai sebesar 3,22%, sedang pada tahun 2015 terjadi penurunan 0,42% dengan nilai sebesar 2,80 begitu pula pada tahun 2016, mengalami penurunan 0,02% dengan nilai sebesar 2,78%.

Dapat kita ketahui bahwa nilai terendah terjadi pada tahun 2012 dimana nilainya sebesar 2,05%. Penurunan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2012 disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan non PAD yaitu pendapatan dari DAK seperti DAK bidang jalan, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian. Sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,22%. Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2014 disebabkan karena turunnya realisasi atas pendapatan non PAD pada tahun 2015 seperti dari hasil bukan pajak, sumber daya alam dari sektor iuran hak perusahaan hutan dan bagi hasil pajak provinsi dari sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan AP.

Tabel 5
Penghitungan REKD DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2012	4,039,105,487	11,582,482,885.86	34.87	Tidak Efisien
2013	2,101,562,185	13,798,177,820.61	15.23	Efisien
2014	9,968,312,785	23,589,608,190.34	16.25	Efisien
2015	8,001,946,364	25,506,504,287.59	31.37	Tidak Efisien
2016	4,619,349,179	32,701,048,951.41	30.26	Tidak Efisien

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya atau biaya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfluktuasi dan terjadi tiga kali kenaikan yaitu pada tahun 2012 sebesar

34,87%, tahun 2015 sebesar 31,37%, dan tahun 2016 sebesar 30,26%. Ini dikarenakan kebijakan arah pembelanjaan belanja tidak langsung yang terfokus pada perbaikan struktur masih minim dalam pengembangannya. Seperti pembukaan jalan, perbaikan jalan, dan pembuatan jembatan sehingga pembiayaan yang dikeluarkan lebih besar dan menerima output yang sedikit. Hal ini tergolong tidak efisien karena interval efisiensinya diatas 40%. Dilihat pada tahun 2013 sebesar 15,23% dan tahun 2014 sebesar 16,25%. Ini tergolong efisien karena intervalnya dibawah 20%. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien atau dibawah 100% dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang baik.

Dilihat dari segi Efisiensi, faktor yang mempengaruhi adalah proses pelaksanaannya, dimana waktu awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal tidak sesuai (pelaksanaan kegiatannya terlambat).

Tabel 6
Penghitungan REPAD DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2012	11,582,482,885.86	11,444,098,005.00	101,20	Sangat Efektif
2013	13,798,177,820.60	14,801,879,767.65	93,21	Cukup Efektif
2014	23,589,608,190.34	24,894,901,154.33	94,75	Cukup Efektif
2015	25,506,504,287.59	26,881,600,327.52	94,89	Cukup Efektif
2016	32,701,048,951.41	36,754,878,027.12	88,98	Kurang Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2012 sebesar 101,20% yang tergolong sangat efektif, karena nilai yang diperoleh diatas 100%. Hal ini dikarenakan Realisasi PAD melebihi yang ditargetkan, sehingga PAD tahun tersebut sangat optimal. Pada tahun 2013 sampai 2015 efektivitas keuangan DPPKAD kabupaten SIGI menurun atau tergolong cukup efektif karena intervalnya masih di bawah 100% dengan nilai 93,21% ditahun 2013, 94,75% ditahun 2014 dan 94,89% ditahun 2015. Untuk tahun 2016 efektivitas keuangan kabupaten SIGI sangat menurun dan termasuk golongan Kurang efektif karena dibawah interval 80%. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten SIGI dapat dikatakan mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya.

Tabel 7
Penghitungan RBO DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	TBO (Rp)	TBD (Rp)	RBO (%)	Kriteria
2012	476,898,961,239.53	605,865,823,109.53	78,71%	Serasi
2013	522,942,339,178.69	661,992,088,489.69	79%	Serasi
2014	587,893,274,774.60	747,623,458,900.60	78,63%	Serasi
2015	636,539,231,022.69	840,204,368,267.41	75,77%	Serasi
2016	708,614,063,408.24	1,039,353,565,302.16	68,18%	Serasi

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Operasi mengalami penurunan tiap tahunnya, dimulai dari tahun 2012 dengan nilai sebesar 78,71%, tahun 2013 meningkat dengan nilai sebesar 79%, tahun 2014 menurun dengan nilai sebesar 78,63%, kemudian tahun 2015 menurun lagi dengan nilai sebesar 75,77% dan tahun 2016 terjadi menurun yang lebih dengan nilai yang lebih sebesar 68,18%. Interval rasio keserasian belanja operasi kabupaten SIGI tergolong serasi karena berinterval dibawah 80%. Yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 8
Penghitungan RBM DPPKAD Kabupaten SIGI
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	TBM (Rp)	TBD (Rp)	RBM (%)	Kriteria
2012	127,794,380,043,53	605,865,823,109.53	21,10%	Kurang Serasi
2013	137,095,235,311.00	661,992,088,489.69	20,70%	Kurang Serasi
2014	158,151,564,126.00	747,623,458,900.60	21,15%	Kurang Serasi
2015	202,289,729,244.72	840,204,368,267.41	24,08%	Kurang Serasi
2016	330,427,421,659.92	1,039,353,565,302.16	31,80%	Kurang Serasi

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI, (2017).

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 diketahui bahwa Kinerja Keuangan Pemda SIGI jika dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Modal meningkat di beberapa tahun, dimulai dari tahun 2012 sebesar 21,10%, tahun 2013 menurun sebesar 20,70%, tahun 2014 meningkat sebesar 21,15%, tahun 2015 meningkat lagi sebesar 24,08% dan tahun 2016 meningkat lebih sebesar 31,80%. Walaupun nilainya di beberapa tahun meningkat berturut turut, Interval rasio keserasian belanja modal kabupaten SIGI tergolong kurang serasi karena intervalnya dibawah 40%. Yang terdiri atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%.
 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%.
 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfluktuasi dan terjadi tiga kali kenaikan. Dapat kita lihat bahwa nilai yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 34,87% Hal ini tergolong tidak efisien karena interval efisiensinya diatas 40%.
 4. Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah daerah memiliki nilai tertinggi ditahun 2012 karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Sedangkan nilai terendah pada tahun 2016 karena efektivitasnya masih di bawah 100%.
 5. Rasio Keserasian Pemerintah daerah sebagian besar dananya masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dengan rata-rata belanja diatas 70% sehingga belanja modal relatif kecil dengan rata-rata belanja dibawah 60%.
1. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara

sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparat daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2. Pemerintah Kabupaten SIGI harus mampu menyeimbangkan Pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit yang berulang-ulang.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIGI diharapkan dapat mengelolah pendapatan agar meningkatnya sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui kegiatan diklat maupun studi banding dengan instansi luar daerah Kabupaten SIGI.
4. Dinas Pendapatan Pengaelolaan Aset dan Daerah seharusnya diakhir tahun, diawal bulan Desember dan Januari sudah selesai dalam menyusun harga satuan sehingga pelaksanaan program tidak akan menghambat karena proses penyusunan yang belum selesai.
5. Diharapkan rekomendasi yang diajukan oleh penulis akan membuat penerapan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi lebih baik dan dapat menekan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi realisasi anggaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten SIGI.
6. Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten SIGI. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

6. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*. Makasar. Graha Ilmu.
- DPPKAD, 2017. *Laporan Realisasi Anggara*. Kabupaten SIGI: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi 3*. Jakarta. Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- _____. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga.
- _____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Refisi*. Yogyakarta. Erlangga.
- _____. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisis kedua*. Yogyakarta. Sekolah Tinngi Ilmu Manajemen ykpn.